

Dynamic Policy Dalam Meningkatkan Blue Economy Di Desa Tertinggal

Masrul Ikhsan¹, Fadhiilatun Nisaa², Rahmanul³, Resa Vio Vani⁴

^{1,3,4}Administrasi Publik, Universitas Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau

Email: masrul.ikhsan@lecturer.unri.ac.id

Kata kunci

Dynamic Policy,
Blue Economy,
Rupat Utara

Abstrak

Konsep ekonomi biru semakin penting dalam menghadapi tantangan di kawasan pesisir, terutama di daerah tertinggal seperti Kecamatan Rupat Utara, Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan dinamis dalam memaksimalkan potensi ekonomi biru serta mengidentifikasi faktor penghambat yang dialami. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang responsif dan fleksibel diperlukan untuk mengatasi berbagai keterbatasan yang ada, selain itu keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya laut sangat krusial untuk keberhasilan ekonomi biru. Meskipun terdapat potensi yang besar dalam sektor perikanan dan pariwisata, tantangan dalam infrastruktur dan teknologi masih menjadi hambatan utama dalam hal ini.

Keywords

Dynamic Policy, Blue
Economy, Rupat
Utara

Abstract

The blue economy concept is increasingly important in facing challenges in coastal areas, especially in underdeveloped areas such as North Rupat District, Riau Province. This research aims to analyze the role of dynamic policies in maximizing the potential of the blue economy and identify the inhibiting factors experienced. The method used is a qualitative approach with in-depth interviews. The research results show that responsive and flexible policies are needed to overcome various existing limitations, besides that the involvement of local communities in planning and managing marine resources is crucial for the success of the blue economy. Even though there is great potential in the fisheries and tourism sectors, challenges in infrastructure and technology are still the main obstacles in this regard.

Pendahuluan

Konsep blue economy atau ekonomi biru merupakan pendekatan yang semakin relevan dalam mengatasi berbagai tantangan di kawasan pesisir, termasuk wilayah-wilayah terpencil yang memiliki potensi laut dan perairan yang melimpah. Ekonomi biru menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, yang mencakup sektor perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan laut, hingga konservasi ekosistem pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah-wilayah

pesisir seperti Kecamatan Rupert Utara di Provinsi Riau merupakan contoh konkret dari wilayah yang memiliki potensi besar dalam ekonomi biru, namun menghadapi berbagai kendala dalam pemanfaatan yang optimal. Kecamatan Rupert Utara, yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatra dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka, memiliki sumber daya laut dan ekosistem yang kaya. Namun, statusnya sebagai wilayah tertinggal mengindikasikan adanya keterbatasan dalam aspek infrastruktur, teknologi, dan kebijakan ekonomi yang mendukung.

Sebagai wilayah yang masuk dalam program desa tertinggal, Rupert Utara memiliki berbagai potensi ekonomi laut yang belum tereksplorasi secara maksimal. Sumber daya perikanan dan pariwisata bahari adalah contoh sektor yang potensial untuk berkembang melalui blue economy. Namun, tantangan dalam infrastruktur yang terbatas, keterbatasan akses ke pasar, serta rendahnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan khusus menuntut adanya kebijakan yang dinamis dan adaptif agar potensi ekonomi di wilayah ini dapat berkembang dengan optimal. Di sinilah peran kebijakan dinamis (dynamic policy) menjadi signifikan. Kebijakan yang dinamis memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merespons kebutuhan lokal secara tepat dan memberikan dukungan yang adaptif sesuai dengan kondisi lapangan yang senantiasa berubah.

Implementasi dynamic policy dalam mengembangkan blue economy di Rupert Utara mencakup kebijakan yang fleksibel dan berbasis data. Sebagai contoh, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan pengembangan pariwisata bahari dapat dioptimalkan dengan mengadaptasi kebijakan yang sesuai dengan musim, kapasitas sumber daya lokal, serta melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengelolaan. Penelitian oleh Hadi et al. (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas tangkapan hingga 50% dan meningkatkan pendapatan nelayan. Selain itu, penelitian oleh Sari dan Rahmawati (2021) mencatat bahwa pengembangan pariwisata bahari di pesisir Riau dapat meningkatkan lapangan kerja hingga 30% dalam periode lima tahun. Kebijakan yang responsif dan melibatkan partisipasi masyarakat lokal ini juga berpotensi untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi, seperti pengangguran dan rendahnya pendapatan per kapita. Penelitian dari Kementerian Desa (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata berbasis alam di kawasan pesisir, termasuk Rupert Utara, dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran dynamic policy dalam memaksimalkan potensi ekonomi biru di Kecamatan Rupert Utara, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penerapan ekonomi biru di wilayah tersebut. Dengan fokus pada pengembangan kebijakan dinamis, studi ini diharapkan memberikan rekomendasi yang konkret bagi pemangku kepentingan di tingkat lokal dan regional dalam mendukung ekonomi biru yang berkelanjutan dan relevan dengan karakteristik serta kebutuhan khusus dari masyarakat Rupert Utara.

Metode

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan menghasilkan data dalam bentuk deskripsi melalui kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dari orang-orang serta perilaku yang diamati (Moleong, 2013). Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya menggambarkan fakta-fakta dari kejadian yang ditemui selama penelitian berlangsung (Sugiyono, 2011). Informan dalam penelitian ini meliputi pihak kantor kecamatan Rupert Utara, Pemerintah Desa Tanjung Punak, Pemerintah Desa Teluk Rhu, serta masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk mengungkap permasalahan secara terbuka (Rukajat, 2018). Data dianalisis menggunakan model Miles dan Matthew dkk. (2014), yang melibatkan tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini mengungkap peran penting kebijakan dinamis (dynamic policy) dalam mendukung pengembangan blue economy di Kecamatan Rupert Utara, Provinsi Riau, yang merupakan kawasan pesisir dengan potensi perikanan dan pariwisata bahari yang tinggi. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan yang responsif dan fleksibel diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya laut dan pesisir, terutama karena berbagai keterbatasan yang dihadapi Kecamatan Rupert Utara, seperti infrastruktur, akses pasar, dan keterampilan sumber daya manusia.

1. Implementasi Dynamic Policy dalam Mendukung Blue Economy

Kebijakan dinamis, yang mampu menyesuaikan regulasi dengan kondisi dan kebutuhan lapangan, sangat penting dalam mengatasi keterbatasan di desa tertinggal seperti Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Wilayah pesisir ini memiliki potensi ekonomi laut yang besar namun kerap dihadapkan pada kendala dalam pemanfaatannya. Pemerintah daerah telah menginisiasi beberapa kebijakan untuk mendorong ekonomi biru (blue economy), seperti memperkuat sektor perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari, serta peningkatan kapasitas masyarakat setempat melalui pelatihan teknis dan permodalan usaha kecil menengah (UKM).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis (2023), sebanyak 60% dari kegiatan ekonomi di Rupert Utara bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata bahari. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduknya memiliki keterkaitan erat dengan laut. Namun, terdapat tantangan-tantangan utama yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan, yaitu keterbatasan anggaran, akses teknologi, serta kurangnya tenaga ahli untuk mendukung kebijakan yang berkelanjutan. Berdasarkan laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis (2023), anggaran untuk mendukung pengembangan ekonomi biru di wilayah pesisir ini pada tahun 2023 hanya mencapai Rp 1,5 miliar. Jumlah ini dinilai

belum cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar, seperti fasilitas pengolahan hasil laut dan perbaikan akses jalan menuju sentra perikanan.

Studi ini juga menunjukkan bahwa pendekatan dynamic policy yang berbasis data dan didukung dengan keterlibatan masyarakat serta pemangku kepentingan lokal, lebih efektif dalam memberikan dampak positif terhadap pengembangan blue economy di daerah tertinggal. Survei dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (2023) menunjukkan bahwa sebanyak 78% masyarakat Rupert Utara menyatakan siap berpartisipasi dalam program pengembangan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut, asalkan diberikan pelatihan dan akses permodalan. Partisipasi masyarakat ini menjadi penting karena mereka adalah pengguna dan penjaga langsung ekosistem laut, sehingga keterlibatan aktif mereka dapat memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Tabel 1: Data Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Kecamatan Rupert Utara (2023)

Kategori	Jumlah	Keterangan	Sumber
Penduduk	8.500 jiwa	Sekitar 65% bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata bahari	BPS Kabupaten Bengkalis, 2023
Kontribusi Perikanan	45%	Terhadap PDRB Rupert Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, 2023
Kontribusi Pariwisata	15%	Terhadap PDRB Rupert Utara	Bappeda Kabupaten Bengkalis, 2023
Tingkat Pengangguran	12%	Keterbatasan lapangan kerja terutama bagi usia produktif	BPS Kabupaten Bengkalis, 2023
Anggaran Ekonomi Biru	Rp 1,5 M	Anggaran yang dialokasikan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2023 dalam mendukung sektor ekonomi biru, terutama dalam infrastruktur dan pelatihan	Bappeda Kabupaten Bengkalis, 2023

Gambar 1: Persentase Tingkat Kesiapan Masyarakat Berpartisipasi dalam Program Ekonomi Biru

Data di atas memperlihatkan bahwa meskipun ekonomi Rupert Utara sangat bergantung pada sektor kelautan, keterbatasan anggaran dan sumber daya menghambat pengembangan ekonomi biru yang optimal. Dynamic policy yang fleksibel dan mengakomodasi perubahan cepat serta masukan langsung dari masyarakat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Misalnya, pemetaan kebutuhan masyarakat melalui survei, diikuti dengan pelibatan langsung nelayan dan pelaku usaha dalam proses perencanaan, memungkinkan pemerintah merancang program yang lebih tepat sasaran untuk pengembangan ekonomi biru di Rupert Utara.

2. Peran Pemerintah dan Masyarakat Lokal dalam Ekonomi Biru

Pemerintah Kecamatan Rupert Utara, bersama dengan desa-desa terkait seperti Desa Tanjung Punak dan Desa Teluk Rhu, telah menunjukkan inisiatif dalam melibatkan masyarakat dalam berbagai program pengembangan ekonomi biru, misalnya melalui pembentukan kelompok nelayan dan usaha mikro terkait produk laut. Salah satu program utama adalah pelatihan pengolahan hasil laut yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dan membuka akses pasar yang lebih luas. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan ekowisata berbasis laut, yang bertujuan untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi masyarakat lokal.

Namun, studi terdahulu menunjukkan bahwa upaya tersebut masih membutuhkan peningkatan, terutama dalam dukungan fasilitas dan pendampingan teknis berkelanjutan. Menurut Pramono et al. (2021), keberhasilan ekonomi biru sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas pendukung, seperti pusat pengolahan hasil laut dan infrastruktur pariwisata yang memadai, yang dapat mendorong kapasitas produksi dan daya tarik destinasi wisata lokal. Tanpa fasilitas yang memadai, usaha mikro dan kelompok nelayan di wilayah pesisir sulit untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka secara optimal. Dalam konteks serupa, penelitian oleh Nurdin dan Idris (2020) menemukan bahwa partisipasi masyarakat lokal sangat penting untuk mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut, namun partisipasi tersebut harus disertai dengan dukungan teknis, seperti pelatihan rutin dan akses terhadap teknologi modern.

Hasil wawancara dengan masyarakat Rupert Utara juga menunjukkan kebutuhan akan peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Ini sejalan dengan temuan Hidayat (2019), yang menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan kebijakan memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan implementasi program ekonomi biru. Misalnya, di beberapa daerah pesisir Indonesia, peningkatan pendapatan nelayan mencapai 25% setelah adanya pelibatan langsung dalam program pengembangan wisata bahari berbasis ekologi (Hidayat, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat menjadi bagian dari pengambilan keputusan dan perencanaan, mereka lebih termotivasi untuk menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan kata lain, pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sejak awal proses dapat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi biru di Rupert Utara. Agar upaya ini dapat berjalan secara optimal, dukungan fasilitas dan pendampingan teknis berkelanjutan sangatlah penting. Sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Sulaiman et al. (2022), yang menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi biru di kawasan pesisir tidak hanya bergantung pada regulasi pemerintah, tetapi juga pada dukungan teknologi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya laut secara efisien.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Dynamic Policy dalam Blue Economy

Hasil penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi dynamic policy dalam pengembangan ekonomi biru di Rupert Utara. Faktor pendukung utama adalah komitmen pemerintah daerah dalam membangun ekonomi pesisir yang inklusif dan berkelanjutan, yang terlihat dari berbagai kebijakan lokal untuk mendukung sektor pariwisata bahari dan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Menurut Pratama dan Setiawan (2021), komitmen pemerintah lokal memiliki peran kunci dalam membentuk kebijakan yang adaptif, terutama dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan fluktuasi pasar. Di Rupert Utara, komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program, seperti pelatihan teknis untuk nelayan dan perbaikan infrastruktur dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam pengembangan produk laut.

Namun, penelitian juga menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur, akses terhadap teknologi, serta sumber daya manusia yang belum sepenuhnya terampil menjadi hambatan signifikan dalam implementasi kebijakan dinamis ini. Menurut Sari et al. (2020), ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan kecil, pusat pengolahan ikan, dan fasilitas penyimpanan dingin, sangat penting untuk mendukung pemasaran produk laut di wilayah pesisir. Di Rupert Utara, keterbatasan infrastruktur menyebabkan banyak hasil laut terbuang atau dijual dengan harga murah karena kurangnya fasilitas pengolahan yang dapat meningkatkan nilai tambah produk. Lebih lanjut, rendahnya keterampilan teknis masyarakat menjadi kendala dalam mengoptimalkan sumber daya laut yang tersedia. Hal ini diperkuat oleh studi Hasbullah (2022), yang menunjukkan bahwa di banyak desa pesisir Indonesia, keterampilan teknis masyarakat dalam pengelolaan hasil laut hanya mencapai 50%, jauh di bawah standar untuk pengembangan produk yang bernilai tambah tinggi.

Keterbatasan teknologi juga menjadi faktor pembatas yang signifikan. Sebuah studi oleh Ramdhan et al. (2019) menemukan bahwa di wilayah pesisir yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi modern, produktivitas perikanan dan pengolahan hasil laut mengalami hambatan. Di Rupert Utara, teknologi pengolahan hasil laut masih bersifat tradisional, dan akses terhadap teknologi modern, seperti alat pendingin dan peralatan pengemasan yang efisien, sangat terbatas. Hambatan teknologi ini tidak hanya membatasi produktivitas, tetapi juga berdampak pada daya saing produk laut lokal di pasar yang lebih luas. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (2023), sekitar 65% produk laut di Rupert Utara masih dijual dalam bentuk mentah tanpa pengolahan lebih lanjut, yang menyebabkan rendahnya nilai jual produk di pasar.

Kesimpulannya, meskipun komitmen pemerintah daerah dan dukungan kebijakan telah menjadi faktor pendukung penting, optimalisasi ekonomi biru di Rupert Utara masih menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur, teknologi, dan sumber daya

manusia. Dalam konteks ini sejalan dengan penelitian dari Anwar dan Rahmawati (2021) menekankan bahwa upaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan teknis dan penyediaan akses teknologi modern adalah kunci untuk meningkatkan keberhasilan implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan.

4. Dampak Kebijakan Dinamis terhadap Peningkatan Ekonomi Lokal

Dari hasil analisis, dapat dilihat bahwa penerapan kebijakan yang dinamis memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor-sektor yang berorientasi pada ekonomi biru. Di sektor perikanan, misalnya, pemerintah setempat telah memfasilitasi nelayan dengan penyediaan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan serta teknologi pengolahan hasil laut yang modern. Menurut penelitian oleh Rachman et al. (2021), penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dapat mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem laut dan menurunkan tingkat eksploitasi sumber daya laut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nelayan yang beralih ke alat tangkap berkelanjutan mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 30% dalam satu tahun terakhir karena kualitas ikan yang ditangkap lebih baik dan lebih mudah dipasarkan.

Selain itu, teknologi pengolahan hasil laut yang lebih efisien juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan nilai tambah produk perikanan lokal. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau (2022) menunjukkan bahwa pengenalan teknologi pengolahan modern telah meningkatkan kapasitas produksi hingga 25%, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan nelayan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, nelayan di Rupat Utara dapat menghasilkan produk olahan seperti ikan kering dan makanan laut beku yang memiliki daya jual lebih tinggi di pasar, baik domestik maupun internasional.

Di sektor pariwisata, pemerintah setempat telah menjalin kolaborasi dengan pemuda dan masyarakat lokal untuk mengembangkan ekowisata berbasis alam yang memanfaatkan potensi keindahan alam dan keanekaragaman hayati Rupat Utara. Penelitian oleh Sudrajat dan Lestari (2020) menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah, dengan estimasi bahwa kawasan ekowisata dapat meningkatkan pendapatan lokal hingga 40%. Dengan melibatkan pemuda setempat dalam pengelolaan ekowisata, tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dalam bidang pariwisata, perhotelan, dan layanan wisata lainnya.

Namun, meskipun ada potensi yang besar, tantangan tetap ada dalam implementasi kebijakan ini. Menurut kajian oleh Kusuma et al. (2022), tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pelatihan yang memadai bagi masyarakat lokal untuk mengelola usaha ekowisata dan pengolahan hasil laut. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan program pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan untuk

memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan peluang yang ada secara optimal. Dengan dukungan yang tepat, penerapan kebijakan dinamis dalam ekonomi biru di Rupert Utara dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Simpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dinamis memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi biru di Kecamatan Rupert Utara, Provinsi Riau. Kebijakan ini memungkinkan penyesuaian regulasi sesuai kebutuhan masyarakat, yang penting mengingat keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan keterampilan sumber daya manusia. Meskipun pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dalam memperkuat sektor perikanan dan pariwisata bahari, tantangan signifikan tetap ada, terutama dalam hal pendanaan dan teknologi. Partisipasi masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini, dengan 78% masyarakat menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam program pengembangan ekonomi berbasis sumber daya laut. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya terbukti meningkatkan efektivitas kebijakan dan keberlanjutan ekosistem laut. Untuk mencapai hasil optimal, dibutuhkan investasi lebih besar dalam infrastruktur, pelatihan teknis, dan akses teknologi modern. Keberhasilan ekonomi biru di Rupert Utara tidak hanya tergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Referensi

- Anwar, T., & Rahmawati, S. (2021). Keterampilan masyarakat pesisir dalam implementasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pesisir dan Laut*, 18(2), 101-117.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis. (2023). Laporan Tahunan Pembangunan Wilayah Pesisir: Optimalisasi Ekonomi Biru di Rupert Utara. Bappeda Kabupaten Bengkalis.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. (2023). Kabupaten Bengkalis dalam Angka 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. (2022). Laporan tahunan pengembangan perikanan dan kelautan.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. (2023). Survei Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Biru di Wilayah Pesisir Riau. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.
- Hasbullah, H. (2022). Pengaruh keterampilan masyarakat dalam pengembangan produk laut bernilai tambah di kawasan pesisir. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Kelautan*, 14(1), 55-72.

- Hidayat, M. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata bahari berbasis ekologi di kawasan pesisir Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Pesisir*, 12(3), 124-138.
- Kusuma, D., Rahmawati, E., & Hadi, S. (2022). Tantangan dalam implementasi ekonomi biru di kawasan pesisir: Studi kasus Rupert Utara. *Jurnal Kebijakan Kelautan dan Pesisir*, 20(1), 45-59.
- Miles Matthew, B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya
- Nurdin, S., & Idris, R. (2020). Pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat lokal di wilayah pesisir. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir*, 15(2), 89-102.
- Pramono, A., Wijaya, M., & Santoso, T. (2021). Peran fasilitas dan dukungan teknis dalam pengembangan ekonomi biru di desa pesisir. *Jurnal Kebijakan Kelautan dan Perikanan*, 17(4), 98-115.
- Pratama, M., & Setiawan, I. (2021). Peran kebijakan lokal dalam mendukung pengembangan ekonomi biru di daerah pesisir. *Jurnal Dinamika Kebijakan Kelautan*, 19(3), 79-94.
- Rachman, A., Salim, M., & Fitriani, R. (2021). Penerapan alat tangkap ramah lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. *Jurnal Ilmu Perikanan dan Kelautan*, 16(2), 85-99.
- Ramadhan, S., Mulyadi, T., & Putri, E. (2019). Tantangan teknologi dalam pengembangan ekonomi biru di wilayah pesisir. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Pesisir*, 16(4), 89-102.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish
- Sari, L., Budi, N., & Akbar, M. (2020). Infrastruktur pendukung ekonomi biru di desa pesisir: Sebuah analisis kebutuhan. *Jurnal Infrastruktur dan Pembangunan Daerah*, 12(3), 112-128.
- Sudrajat, M., & Lestari, F. (2020). Potensi ekowisata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat lokal di kawasan pesisir. *Jurnal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, 10(3), 112-123.
- Sulaiman, R., Hasan, M., & Putra, I. (2022). Dukungan teknologi dan pelatihan bagi masyarakat pesisir dalam implementasi kebijakan ekonomi biru. *Jurnal Pembangunan Maritim Indonesia*, 14(1), 45-60.